

PERAN POLITIK UMAT ISLAM DI PERANCIS PADA MASA PRESIDEN NICOLAS SARKOZY (2007-2012)

Imam Marzuki

*Ikatan Keluarga Alumni Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Abstrak: *Adapun peran penting yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Perancis dalam pemerintahan Sarkozy, antara lain membantu perekonomian Perancis lewat besarnya jumlah imigran yang menjadi buruh dan bekerja di pabrik-pabrik pada dunia industri Perancis. Dalam ranah politik kaum muslim berperan penting dalam mengubah arena politik Prancis dengan menjegal Sarkozy terpilih kembali sebagai presiden dan memenangkan Francois Hollande, calon Presiden Partai Sosialis sebagai Presiden. Sasaran utama pergerakan politik umat Islam di Prancis adalah menuntut pengakuan atau persamaan hak sebagai warga negara, serta di sisi lain pengakuan tersebut memberikan tingkat kepercayaan diri dalam berasimilasi dengan hukum yang berjalan di Perancis, dengan pengertian yang lebih tepat sasaran diatas Laicite hukum yang berjalan dalam diskursus agama dan negara.*

Keyword : Peran Politik Umat Islam, Nicolas Sarkozy, Perancis.

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama dengan tingkat pertumbuhan tercepat di dunia terutama di kawasan Amerika dan Eropa seperti Inggris, Jerman, Belanda dan Perancis. Pada abad ke-20, Islam berkembang dengan sangat pesat di daratan Eropa. Perlahan-lahan, masyarakat di benua biru yang mayoritas beragama Kristen dan Katolik ini mulai menerima kehadiran Islam. Tak heran bila kemudian Islam menjadi salah satu agama yang mendapat perhatian serius dari masyarakat Eropa.

Kehadiran Islam di Perancis sudah ada semenjak akhir abad 19 dan awal abad 20, bahkan, pada tahun 1922, telah berdiri sebuah masjid yang sangat megah bernama Masjid Raya Yusuf di ibu kota Perancis, Paris. Masuknya Islam di perancis tidak lepas dari sejarah kolonialisme Perancis di Afrika Utara seperti di Tunisia, Maroko dan Aljazair. Bahkan Aljazair merupakan bagian dari Perancis sampai tahun 1962. Pada periode itu Perancis merekrut warga Aljazair untuk menjadi tentara maupun tenaga

buruh. Migrasi muslim pertama ke Perancis dari negara-negara Afrika Utara secara terorganisir dimulai saat terjadi Perang Dunia I (1914-1918).¹

Sebenarnya Islam masuk ke Perancis telah lama sekali, yaitu sejak abad 8 M. Islam masuk ke kota-kota selatan Perancis melalui Spanyol ke Toulouse, Narbonne dan sekitarnya hingga Bourgogne di tengah-tengah Perancis. Namun baru pada abad 12 hingga abad 15 orang-orang Islam mulai menempati kota-kota selatan Perancis yang terdapat di provinsi Roussillon, Languedoc, Provence, Pay Basque Perancis termasuk Bearn. Hal ini berlangsung secara bertahap dan puncaknya adalah ketika terjadi pengusiran besar-besaran terhadap muslim Spanyol pada peristiwa Reconquista di bawah raja Ferdinand II dan istrinya ratu Isabelle pada tahun 1492 M.²

Tahap berikutnya adalah setelah Perang Dunia I dan II. Sebagian Muslim yang masuk ke Perancis adalah para korban perang. (Palestina, Turki, Tunisia dll). Sementara sebagian besar lagi datang dari Aljazair sekitar tahun 1960-an karena Perancis membutuhkan sejumlah besar tenaga dalam rangka membangun negaranya yang hancur karena perang. Perlu dicatat, Aljazair adalah satu dari negara bekas jajahan Perancis. Pada tahun 1970-an, imigran Muslim kembali mendatangi negara pencetus *trias politica* itu. Kali ini, para pelajar Muslim yang datang ke Prancis untuk menuntut ilmu. Kedatangan para pelajar ini menjadi faktor penting yang mengambil peran besar dalam mendorong penyebaran Islam dan berkehidupan Islam di jantung negeri Napoleon Bonaparte ini. Peristiwa besar ini tidak luput dari perhatian dunia, mengingat kehadiran umat Islam di salah satu negara Eropa selalu menjadi dilema bagi para penguasa setempat, terutama yang menyangkut ketenagakerjaan (buruh) dan masalah sosial.

Namun seiring dengan perkembangan Islam di Perancis, umat Islam pun mulai mendapat tekanan dan diskriminasi baik dari kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Perancis maupun dari kelompok-kelompok masyarakat yang anti terhadap Islam (Islamophobia). Hal ini terjadi seiring terjadinya peristiwa teror yang notabene dilakukan umat Islam itu sendiri yang puncaknya adalah serangan terhadap menara kembar WTC (*World Trade Center*) di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 yang menelan korban hingga ribuan jiwa dari berbagai

¹Bustamam Ismail, “menelusuri Islam di Prancis”, <http://hbis.wordpress.com/2012/03/19/menelusuri-islam-di-perancis/>, akses 15 September 2012.

²“Perkembangan Islam Modern di Prancis”, <http://armecy.blogspot.com/2012/10/perkembangan-Islam-modern-di-perancis.html>. akses 15 September 2012.

negara.³ Sejak peristiwa kelam 11 September 2001, Islam mendapat cap baru yaitu, agama teroris. Dengan berbagai alasan dan dalih, Amerika Serikat menjadi pelopor dan penggerak agar dunia mengutuk dan menjauhi Islam. Timbullah apa yang disebut Islamophobia. Ajaran Islam mulai jilbab, poligami, jihad hingga masalah penampilan seperti jenggot dan lain lain menjadi obyek serangan.⁴

Pasca peristiwa teror yang mengguncangkan dunia tersebut, umat Islam terutama di negara-negara Barat mulai mendapat banyak tekanan terutama regulasi/kebijakan dalam pemerintahan. Kebijakan yang diambil pemerintah Perancis antara lain disahkannya undang-undang yang melarang pemakaian atribut dan identitas keagamaan yang mencolok di tempat umum dan sekolah-sekolah negeri, termasuk penggunaan hijab, lambang salib, dan *kippa* (kopiah) warga Yahudi, peraturan yang melarang pelajar Muslimah dan pegawai negeri mengenakan jilbab selama mereka berada di lingkungan sekolah dan kerja. Begitupun dengan masjid. Azan dilarang dikumandangkan bila suaranya terdengar hingga ke luar lingkungan masjid. Menara masjid tidak boleh lebih tinggi dari 30 meter. yang mulai diberlakukan mulai tanggal 2 September 2004.

Banyaknya tekanan yang dirasakan umat Islam di negara-negara Barat membuat belasan ribu umat Islam turun ke jalan di berbagai negara untuk melakukan demonstrasi. Penentangan ini merupakan tuntutan akan hak mereka terhadap kebebasan menjalankan ajaran agama dan menilai undangundang tersebut telah melanggar standar internasional hak asasi manusia. Di perancis keadaan menjadi lebih tidak kondusif pasca pernyataan *Nicolas Sarkozy* yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri yang mengatakan bahwa kaum imigran (yang didominasi umat Islam) tidak lebih sebagai sampah. Pernyataan ini memicu terjadinya kerusuhan yang dilakukan oleh kaum imigran dengan melakukan perusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum, gedung, kendaraan dan serangan terhadap polisi dan warga sipil.

Berdasarkan angket yang dibuat pada Maret 2007, jumlah Muslim di Perancis adalah sekitar 4 hingga 5 juta orang atau 6 % dari total penduduk Perancis. (Katholik 64 %, Ateis 27.2 %, Protestan 2.1 % dan Yahudi 0.6 %). Jumlah ini merupakan jumlah terbesar dibandingkan Muslim di negara-negara Eropa lainnya. (Jerman 2.5 juta, Inggris 1.6 juta, Italy 1.5

³“Kebebasan Muslim Prancis Dibatasi”, <http://goblogger.blogspot.com/2012/09/kebebasan-muslim-prancis-dibatasi.html>, akses 18 September 2012.

⁴*Ibid.*

juta, Spanyol 1 juta dan Belanda 850 ribu). Mereka ini sebagian besar adalah imigran, baik legal maupun illegal.⁵

Setelah itu pemerintah Prancis tidak pernah lagi memiliki keberanian untuk mengadakan angket resmi terhadap jumlah pemeluk Islam di negaranya. Yang pasti ada laporan bahwa sekarang ini telah berdiri 1536 masjid dan mushola di seluruh Prancis. Walaupun tentu saja sebenarnya sebagian besar hanyalah mushola-mushola kecil yang tidak memadai dan letaknya sangat terpencil. Masjid yang tergolong lumayan besar hanya ada beberapa di kota-kota besar seperti Paris, Lille dan Lyon. Terpilihnya Nicolas Sarkozy sebagai presiden Prancis pada Mei 2007, tidak membuat keadaan bagi umat Islam semakin baik, justru sebaliknya, pada masa kepemimpinan presiden Nicolas Sarkozy umat Islam semakin terdiskriminasi melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.

Nicolas Sarkozy, adalah presiden yang paling getol memainkan isu Islam dalam dunia politik, Sarkozy adalah orang pertama yang menyuarakan anti cadar di Prancis, Sarkozy menyuarakan identitas nasional Prancis, untuk menyudutkan imigran Muslim yang dianggap tidak menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Komunitas Muslim juga mendapat banyak tekanan semasa pemerintahan Sarkozy. Mulai dari larangan jilbab dan burka atau cadar, persoalan daging halal hingga larangan kedatangan ulama dari Timur Tengah. Situasi kian runyam, saat terjadi insiden penembakan yang dilakukan Mohammed Merah yang menewaskan 7 orang di depan sekolah Yahudi di Toulouse pada 11 Maret 2012 lalu.

Setelah aksi penembakan yang dituduhkan kepada Mohammed Merah itu, Presiden Prancis saat itu Nicolas Sarkozy, memerintahkan tindakan keras terhadap para pengkhotbah Muslim yang dianggap mempromosikan kebencian di Prancis. Prancis juga melarang masuknya beberapa cendekiawan Muslim untuk menghadiri konferensi Muslim dan mengusir sejumlah imam terkait tuduhan memberikan ceramah yang radikal.⁶ Bertolak dari beberapa permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menulis tentang kondisi umat Islam di Prancis bagaimana peranan yang dilakukan umat Islam di Prancis dalam menghadapi berbagai tekanan pada masa pemerintahan presiden Nicolas Sarkozy.

⁵Vien Am, *Mencermati Islam di Prancis (1)*, <http://vienmuhamadi.com/category/perkembangan-Islam-di-perancis/>, akses tanggal 26 September 2012.

⁶*Muslim Prancis Menjadi Komoditas Politik*” http://www.republika.co.id/berita/duniaislam/islam_nusantara/12/04/09/m27tbc-muslim-prancis-jadi-komoditas-politik, akses 25 September 2012 .

B. Islamisasi, Sejarah dan Keadaan Umat Islam Prancis di Bawah Kekuasaan Nicolas

Negara Perancis, memiliki luas wilayah 557.670 Km², Ibu Kotanya adalah Paris dan bahasa nasionalnya adalah bahasa Perancis, serta kurs mata uangnya adalah Franc. Dari aspek posisinya, Perancis terletak di Eropa Barat antara laut Tengah di Selatan dan Lautan Atlantik di Timur. Negara ini, berbatasan langsung dengan Spanyol di Selatan, Belgia dan Luxemburg di Timur Laut, Jerman dan Swis di Timur serta Italia di Tenggara. Negara ini memiliki iklim dan geografi yang beragam. Perancis dikelilingi oleh lereng pegunungan Alpen dan padang rumput hijau pegunungan Pyrenees yang membentang di Ile de France dan Limousin; kebun anggur terhampar di Lembah Loire dan wilayah sekitar Bordeaux; perbukitan terpencil dan dataran tinggi berbatu batu di Auvergne; daerah industri di wilayah utara; tempat liburan kosmopolitan mewah di pesisir Laut Mediterania di wilayah selatan.⁷

Di samping itu juga, Perancis terkenal sebagai bangsa penjajah terbesar pada urutan kedua setelah Inggris. Sampai saat ini Perancis masih menguasai 10 negeri jajahan yang dinamai "*wilayah seberang Laut*". Dalam sistem Pemerintah republikan di Perancis, mewarisi kekuasaan monarki. Secara fisik bangunan kerajaan telah roboh, tetapi karena pemerintahan yang menggantikan tidak berhasil dengan sempurna mengakomodasi elemen kemasyarakatan *enlightenment*, tradisi monarki tetap masih menjiwai perilaku pemerintah. Tradisi ini mengambil bentuk sistem *despotic* dengan kekuasaan seorang tokoh masih sangat besar, kendati institusi perwakilan ikut menjadi bagian pemerintahan. Selain itu, tradisi monarki juga memelihara bentuk sistem birokrasi dan sistem mengejar keuntungan sendiri. Sentralisasi kekuasaan negara otoritarian menjadi wujud nyata pemerintahan republik, yang artinya statisme tidak mengandung elemen liberal.⁸

Perancis adalah Negara yang menganut sekularisme, yang dasar hukumnya berasal dari dua dokumen utama:⁹

- a. Konstitusi 4 Oktober 1958 yang menetapkan bahwa Perancis seharusnya menjadi sekuler, demokrasi, dan republik. Dari konstitusi ini Perancis diharapkan dapat menerapkan persamaan bagi semua warga tanpa pembedaan berdasar agama dan ras.

⁷Alan Hart, *Tinggal dan Bekerja di Perancis*. Terjemahan Word++Translation Service. (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2008) hlm 1

⁸Afdlal dkk. *Problematisa Minoritas muslim di Kanada dan Perancis*. Dalam Jurnal Politik. Vol 4, No. 1, 2007 Demokrasi mati Suri. (Jakarta; Pustaka Pelajar, 2007), hlm 79

⁹<http://worldnews.about.com/od/france/p/Nicolas-Sarkozy.htm/> Diakses 11 - 12 2012, pukul 23:10 WIB.

- b. *Separation of Church and State Act* yang menyatakan pemisahan gereja dan tindakan Negara. Dokumen tahun 1905 ini menyatakan bahwa tak ada pengakuan dan jaminan langsung terhadap setiap agama di Prancis.

1. Profil Nicolas Sarkozy (Mantan Presiden Prancis 2007-2012)

Presiden Prancis ke 23 ini lahir pada 28 Januari 1955, di Paris sebagai Nicolas Sarkozy Paul Stéphane de Nagy-Bocsa. Ayahnya adalah seorang bangsawan Hungaria dan ibunya adalah keturunan Yahudi dan Katolik Yunani Prancis. Sarkozy dibesarkan di rumah kakek dari pihak ibu. Kakaknya, Guillaume, yang merupakan wakil Presiden *Mouvement des Entreprises de France*, serikat terbesar dari pengusaha di negara ini, dan mantan ketua Serikat Industri Tekstil Prancis. Saudara tirinya Olivier adalah kepala kelompok Jasa Keuangan Global di New York. Di sekolah, Nicolas Sarkozy aktif di politik sayap kanan. Dia adalah penganut Katolik Roma dan dibesarkan di gereja.¹⁰

Reformasi yang telah ditetapkan pada masa tugasnya dengan menaikkan usia pensiun dari 60 tahun menjadi 62 tahun, mengubah jam kerja menjadi 35 jam dalam seminggu, merombak universitas dan mengubah sistem pajak dengan mendorong lembur dan serta kepemilikan rumah. Dengan berbuat demikian, membuat banyak para pemilih terkesan. Reformasi yang telah ditetapkan pada masa tugasnya – dengan menaikkan usia pensiun dari 60 tahun menjadi 62 tahun, mengubah jam kerja menjadi 35 jam dalam seminggu, merombak universitas dan mengubah sistem pajak dengan mendorong lembur dan serta kepemilikan rumah. Dengan berbuat demikian, membuat banyak para pemilih terkesan. Sarkozy memulai karier politiknya sebagai walikota Neuilly sebuah kawasan makmur pinggiran Paris pada periode 1983-1992. Perhatian publik Prancis mulai berdatangan pada tahun 1993 ketika ia secara pribadi ikut campur tangan dalam pembebasan bayi yang disandera oleh seorang pria gila didalam taman kanak-kanak.

Dalam karirnya, awalnya anak didik Jacques Chirac ini menjadi tangan kanan Perdana Menteri Edouard Balladur di 1993-1995, menjabat sebagai menteri anggaran. Ketika Balladur mundur sebagai Presiden pada tahun 1995, hal inilah yang ini menyebabkan munculnya keretakan hubungan yang selama ini langgeng dengan Chirac (kandidat Presiden yang selanjutnya memegang kepemimpinan setelah Mr Balladur dan sebelum era Sarkozy pada 2007), Chirac sendiri merupakan kandidat yang sukses. Chirac pernah mencaci Sarkozy dalam memoarnya yang

¹⁰<http://worldnews.about.com/od/france/p/Nicolas-Sarkozy.htm/> Diakses 11 - 12 2012, pukul 23:10 WIB.

menyebutnya (Sarkozy), "mudah marah, ruam, terlalu percaya diri dan seakan-akan tak diragukan lagi, lebih-lebih tentang hal-hal yang mencakup dirinya sendiri".

Berkenaan dengan pribadi Sarkozy, Anita Hausser, seorang penulis biografi Sarkozy, menggunakan istilah yang berbeda untuk menggambarkan dirinya: "Dia hiperaktif, dia ambisius, dia seorang pekerja berat, gila kerja, ia tidak pernah beristirahat." Memang, media Prancis telah menjulukinya dengan "*hiper-presiden*" karena gaya kepemimpinannya. Sarkozy juga dikenal sebagai "*Presiden bling-bling*" karena kesenangannya mengoleksi jam tangan mahal dan liburan dengan fasilitas mewah.¹¹

2. Islamisasi, Sejarah dan Keadaan Umat Islam di Prancis.

Proses Islamisasi yang dimaksud dalam material skripsi ini adalah merujuk pada batasan pengertian yakni suatu proses yang tidak pernah berhenti sejak datangnya Islam pertama kali, penerimaan dan penyebarannya lebih lanjut. Berkaitan dengan pengertian ini, Penulis menemukan data yang akurat bahwa proses Islamisasi di Prancis telah lama berlangsung dan mengalami beberapa periode, serta perkembangan yang cukup signifikan.

John L. Esposito menyatakan bahwa kehadiran Islam di Prancis menjadi signifikan bersamaan dengan kolonialisasi Afrika Utara yang dimulai pada tahun 1830 M. Pada pedagang yang dikenal dengan istilah "*turcos*" datang dari Aljazair setelah tahun 1850 M, menyusul kemudian imigran Maroko yang banyak bekerja dibagian konstruksi Dermaga Marseilles. Selama perang Dunia I, para imigran yang berjumlah lebih dari 132.000 orang Afrika Utara berdomisili di Prancis sebagai pekerja sawah dan buruh di pabrik senjata, serta lebih dari 15.000 orang diminta untuk terlibat dalam peperangan. Seiring dengan perkembangan waktu, jumlah orang-orang Islam di Prancis bertambah dan semakin plural. Hal ini ditandai dengan hadirnya pedagang Turki, Afrika (Senegal, Mali, Mauritania), Timur Tengah (Iran, Afghanistan, Pakistan). Proses Islamisasi secara implisit di Prancis, telah dimulai sejak terjadinya perang salib, dan secara eksplisit proses Islamisasi di Prancis dimulai pada tahun 1830, yakni ketika imigran muslim berdatangan membawa barang dagangan mereka ke Prancis.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa proses Islamisasi di Prancis pada awalnya melalui jalur peperangan dan proses selanjutnya adalah jalur perdagangan. Dalam masa-masa perkembangannya, proses

¹¹<http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11576712/>. diakses pada 11 -12-2012, 23:34 wib

Islamisasi di Perancis tetap berjalan, namun yang terakhir ini ia berproses melalui jalur dakwah dan perkawinan, karena disana sudah banyak umat Islam yang menetap.

Ada dua tanggal yang menentukan kehidupan kaum muslimin di Perancis : 14 juli 1789 dan 1 juli 1962. Penjara Bastille di pusat kota Paris telah diserbu pada tanggal pertama, yang dinyatakan sebagai awal revolusi Perancis, dan pada tanggal yang terakhir, Aljazair menyatakan kemerdekaannya. Sedikit, bahkan jika ada, umat muslim ikut dalam huru hara massa pada musim panas lebih dari 200 tahun lalu itu (mulainya Revolusi Perancis), akan tetapi tuntutanannya untuk dibebaskan dari kezaliman istana dan untuk memisahkan gereja dan negara, sekarang diabaikan dalam konstitusi dan dimainkan oleh pembela *status quo* setiap kali kaum muslim menuntut hak-hak sipil lain, seperti kebebasan hukum untuk memakai kerudung di sekolah.¹² Tentunya hal ini bertentangan dengan semangat perlawanan pada kaum *bourgeois* pada masa itu.

Jauh sebelumnya, masyarakat Perancis sudah lama mengalami kontak dengan Islam. tepatnya sejak Islam masuk pada abad ke-8 dibagian Selatan Perancis, yakni disaat transisi kekuasaan dari Dinasti Bani Umayyah ke Dinasti Bani Abbāsiyah. Islam berkuasa selama kurang lebih 40 tahun. Demikian pula pada abad ke-10 Islam mencoba memperluas daerah kekuasaannya, tetapi gagal sebab diabad pertengahan ini, Islam menghadapi “*Crusades*” (perang salib) dan akhirnya mereka meninggalkan Perancis. Selanjutnya, bangsa Perancis pernah menginjakkan kakinya di Mesir di saat Napoleon menaklukkan mesir pada tahun 1798. Penaklukan ini, sebenarnya sudah lama diinginkan oleh raja Louis XIV untuk memudahkan jalur perdagangan melalui Laut Merah dan Laut Tengah menuju ke Timur dan ke India. Selanjutnya, dalam Textbook untuk Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN, juga dielaskan bahwa Perancis telah mengenal Dunia Islam sejalan dengan penjajahan yang dilakukannya terhadap wilayah-wilayah yang berpenduduk mayoritas Muslim di Aljazair, Maroko, Tunisia, Senegal, Mali, Libanon, Mesir dan selainnya. Seperti negara industri lainnya, Perancis juga membuka kesempatan kepada “*just arbeiders*” yaitu buruh tamu dari Tunisia, Maroko, Aljazair, Turki dan sebagainya untuk bermukim di Perancis.

Jauh sebelumnya, masyarakat Perancis sudah lama mengalami kontak dengan Islam. tepatnya sejak Islam masuk pada abad ke-8 dibagian Selatan Perancis, yakni disaat transisi kekuasaan dari Dinasti Bani Umayyah ke Dinasti Bani Abbāsiyah. Islam berkuasa selama kurang lebih

¹²Adam Lebor. *Pergulatan muslim di Barat, antara Identitas dan integrasi*. Terjm Yuliani Liputo. (Jakarta; Mizan Pustaka, 2009) hlm 209-210

40 tahun. Demikian pula pada abad ke-10 Islam mencoba memperluas daerah kekuasaannya, tetapi gagal sebab diabad pertengahan ini, Islam menghadapi “*Crusades*” (perang salib) dan akhirnya mereka meninggalkan Perancis. Selanjutnya, bangsa Perancis pernah menginjakkan kakinya di Mesir di saat Napoleon menaklukkan Mesir pada tahun 1798. Penaklukan ini, sebenarnya sudah lama diinginkan oleh raja Louis XIV untuk memudahkan jalur perdagangan melalui Laut Merah dan Laut Tengah menuju ke Timur dan ke India. Selanjutnya, dalam Textbook untuk Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN, juga dielaskan bahwa Perancis telah mengenal Dunia Islam sejalan dengan penjajahan yang dilakukannya terhadap wilayah-wilayah yang berpenduduk mayoritas Muslim di Aljazair, Maroko, Tunisia, Senegal, Mali, Libanon, Mesir dan selainnya. Seperti negara industri lainnya, Perancis juga membuka kesempatan kepada “*just arbeiders*” yaitu buruh tamu dari Tunisia, Maroko, Aljazair, Turki dan sebagainya untuk bermukim di Perancis.

1) Imigran di Perancis Sebelum Perang Dunia I

Sebelum revolusi industri, imigrasi ke Perancis umumnya dilakukan oleh orang-orang dari kelas atas yang datang atas undangan para penguasa saat itu. Baru pada pertengahan abad ke 19 hingga tahun 1914 dimulai kedatangan imigran secara besar-besaran, terutama Belgia dan Italia yang berjumlah hingga 2/3 dari keseluruhan imigran yang ada di Perancis saat itu. Selain itu ada pula yang berasal dari Jerman, Swiss, Spanyol, Inggris, Rusia, dan Austria-Hongaria, walaupun dalam jumlah yang relatif kecil. Pasca PD I sebelum PD II, imigran yang berasal dari Italia adalah yang terbanyak jumlahnya di Perancis. Kemudian saat PD II dimulai, banyak imigran yang keluar dari wilayah Perancis, yaitu sekitar 300.000 ribu orang. Mereka meninggalkan wilayah Perancis untuk menghindari perang pada periode antara bulan September 1939 sampai Juni 1940.

2) Imigran di Perancis Sebelum Perang Dunia I

Imigran yang datang ke Perancis setelah Perang Dunia II masih didominasi oleh mereka yang berasal dari negara-negara tetangganya di Eropa. Namun terlihat penurunan jumlah imigran dari negara Eropa dari tahun ke tahun. Sebaliknya, walaupun jumlahnya masih lebih kecil dibanding imigran Eropa, imigran yang berasal dari Afrika jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Negara-negara Afrika tersebut adalah Aljazair, Maroko, Tunisia (negara magribi), dan juga Afrika hitam yang sejak tahun 1999 jumlahnya meningkat hingga 45%. Tabel berikut

menunjukkan perubahan komposisi dan jumlah imigran di Prancis sejak tahun 1962 – 1999 berdasarkan negara asalnya.

Prancis sudah menerima kedatangan imigran dari berbagai negara yang berbatasan dengannya. Kedatangan imigran pada masa pasca perang dunia II tersebut membawa dampak sosial yang lebih besar dari kedatangan imigran sebelumnya karena adanya perbedaan budaya dan latar belakang sejarah yang terlalu jauh antara para imigran tersebut dengan masyarakat Prancis, yang dipercaya oleh banyak pihak sebagai sebab dari gagalnya usaha pembauran antara pendatang dan warga asli di Prancis atau bisa dikatakan sebagai kegagalan sosial. Kejadian pada bulan November 2005 kemarin menunjukkan bahwa terdapat ketidakpuasan di kalangan imigran dan anak-anak keturunan imigran mengenai situasi kehidupan mereka sebagai warga negara Prancis yang tidak sama dengan orang Prancis asli. Hal ini akibat perlakuan yang mereka terima dalam publik Prancis, termasuk pula status mereka yang berpengaruh pada pergaulan sosial mereka.

Secara teoritis, menurut *Le Haut Conseil d'Intégration*,¹⁵ imigran adalah orang yang lahir diluar teritori Prancis dan masuk ke wilayah Prancis dengan niat untuk tinggal dan menetap dalam teritori Prancis dalam waktu yang lama. Imigran dapat menjadi warga negara Prancis dengan cara naturalisasi. Para imigran umumnya datang ke Prancis dengan tujuan perbaikan nasib dengan mencari kerja untuk membiayai kehidupan keluarga yang mereka tinggalkan di negara asalnya. Sampai tahap ini, imigran yang datang adalah para pria muda yang siap bekerja tanpa memiliki ketrampilan yang cukup maupun pendidikan yang memadai untuk mencapai tingkatan yang cukup tinggi dalam hierarki kelas pekerja. Kebanyakan dari mereka hanya dapat bekerja dalam sektor pembangunan dan industri.

Kesalahpahaman meluas tentang Islam dengan versi sendiri khususnya di Prancis, dimana kekhawatiran publik Prancis meningkat terhadap visibilitas Muslim khususnya sejak tahun 1980-an, terlebih lagi atas peristiwa pembunuhan dengan motif rasis di proyek perumahan di sebuah pinggiran kota. Saat ini terdapat sekitar 4 juta Muslim di Prancis, separuh dari mereka adalah warga negara Prancis. Meskipun mereka datang dalam jumlah yang signifikan dari berbagai negara Muslim seperti Turki dan Senegal, tetapi sebagian besar mereka juga berasal dari Afrika

¹⁵*Le Haut Conseil d'Intégration* adalah instansi pemerintah Prancis yang mengurus dan memberikan pendapat, atas permintaan Perdana Menteri atau Kabinet, mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan integrasi warga asing dan/atau imigran. <http://www.premierministre.gouv.fr>

Utara. Afrika Utara, meskipun budaya khas dari beberapa mereka seagama, menimbulkan tantangan terbesar dalam berasimilasi dengan tradisi Perancis. Kesulitan mereka beradaptasi dengan publik Perancis berasal dari kenangan akan Perancis pada masa kolonialisme di Afrika Utara, dimana umat Islam pada periode itu tidak dianggap sebagai warga negara, kecuali dengan terlebih dahulu menanggalkan ke-Islam-an mereka, meskipun mereka sudah diberikan kewarganegaraan Perancis (Aljazair adalah sebuah departemen Perancis.). Akibatnya, banyak umat muslim Perancis berjuang untuk melawan superioritas dan penghinaan oleh publik asli Perancis, sebagai respon historia akibat perjuangan Muslim di Perancis pada masa Perang Kemerdekaan Aljazair.

Sungguh ironis!, Sejarah terulang kembali dengan kondisi yang terbalik kendati dengan tokoh yang sama, atau dalam hal ini sebagai seseorang yang memiliki kembaran dari yang pernah terjadi di Mediterania, Perancis dalam hal ini sebagai minoritas yang berkuasa (pada masa kolonialisme) berusaha untuk membatasi mayoritas Aljazair di tanah Afrika Utara, sekarang menemukan dirinya, sebagai mayoritas (pemerintahan), berusaha mengasimilasi minoritas Aljazair ditanah sendiri yaitu Perancis.

Dendam terhadap Islam telah berjalan lama karena kedatangannya mengobarkan gairah lama yang telah lama terpendam pada masa "*Laicite*." Mengacu pada kompromi kegelisahan bahwa orang-orang Perancis telah dibuat antara surat Hukum Pemisahan Negara dan Gereja, dan yang khas implementasi dalam budaya Perancis. Cukup paradoks, ketika melewati tahun 1905, tujuan utama hukum itu tidak untuk kebebasan beragama di Perancis. Sebaliknya itu adalah untuk melemahkan pengaruh Katolik dengan menempatkan Katolik pada pijakan yang sama dengan minoritas agama dalam domain publik.

Penerapan hubungan agama dan negara di Perancis dikenal dengan "*laicité*" atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai "*laicisme*". Konsepsi *laicite* mengimplikasikan adanya kebebasan atau netralitas baik terhadap eksistensi dari suatu agama resmi ataupun sistem kepercayaan lainnya, termasuk di dalamnya atheisme. Menariknya, sebagaimana ditunjukkan oleh melemahnya relevansi agama dalam ruang budaya, keadaan itu telah mengakar kuat dimasyarakatnya. Sebagai akibat dari solidnya pondasi bagi sekularisme di Perancis, perdebatan terkait pakaian tradisional Muslimah (*burqah dan niqab*) di Perancis sangat berbeda dengan negara-negara Eropa lainnya. Maka tidak mengherankan bila di Perancis pakaian yang menutup

penuh aurat cenderung dilihat sebagai serangan terhadap kesetaraan terhadap perempuan.¹⁴

Secara praktis, sesuai dengan hukum berarti membatasi agama dengan kata lain menjadikan keyakinan berada dalam ruang privat. Secara teoritis, sesuai berarti dan masih berarti penghormatan extirpating nilai-nilai agama dari segala bidang: personal, keluarga, sosial, budaya, dan politik. Lewat beberapa dekade, kelompok agama besar - Kristen dan Yahudi - telah membuat perdamaian tidak nyaman dengan *Laicite* dengan relegating ekspresi keagamaan ke domain pribadi. Sementara itu di pemukiman Muslim di Perancis hal ini (*Laicite*) telah mengganggu kedamaian (khususnya dalam keseharian sebagai umat Islam yang aktif). Hal ini justru melahirkan kebingungan baru khususnya batas antara ruang publik dan swasta sebagai kontroversi baru atas kebebasan beragama dan toleransi politik.¹⁵

Dalam pemerintahan, Presiden Perancis memiliki kekuasaan nyata, tidak seperti negara-negara lain yang memiliki perdana menteri dengan peran utama dalam pemerintahan sehari-hari. Di Perancis, walaupun ada perdana menteri, presiden memiliki kekuasaan untuk membubarkan parlemen dan menjabat panglima tertinggi angkatan bersenjata serta memberikan pengampunan bagi para terpidana. Nikolas Sarkozy, yang berusia 52 tahun, merupakan Presiden Perancis termuda sejak Valery Giscard d'Estaing pada tahun 1974 (saat terpilih menjadi presiden, d'Estiang berusia 48 tahun). Nicolas Sarkozy, yang disebut Sarko, sebelumnya oleh media massa, disebut-sebut memiliki peluang terbesar untuk menjadi presiden Perancis. Dia merupakan calon dari UMP (*Union pour un mouvement populaire*), yang merupakan mitra utama dalam koalisi petif saat ini. Selain pemerintahan konservatif saat ini.¹⁶

Menurut laporan Marchelon Report (lembaga independen) yang diberi tugas langsung oleh Presiden Nicolas Sarkozy untuk mendata populasi pemeluk agama dikalangan warga Perancis, diketahui 65 persen memeluk Katolik, enam persen menganut Islam, dua persen Protestan, dan diikuti oleh pemeluk Yahudi dan Buddha serta tidak beragama. Ini berarti pemeluk Islam nomor dua di Perancis. Setiap agama memiliki

¹⁴Yudi Junaidi. *Relasi Negara dan Agama: Redefenisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia*, (Cianjur; The Institute for Migrant Rights Press, 2012), hlm. 51.

¹⁵Jocelyne Cesari. "Islam in France: The Shaping of a Religious Minority," dalam Yvonne Haddad-Yazbek (ed.) *Muslims in the West, from Sojourners to Citizens*, 2002, (Oxford University Press, 2002) hlm 36-51

¹⁶Aprillia Firmanasari, *Wacanan Politik Nicolas Sarkozy: Analisis Psikostruktural Lacanian*. Dalam Jurnal Humaniora Vol 19, Edisi 3 Oktober 2007. (Yogyakarta; Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada, 2007), hlm 274

perwakilan organisasi yang diakui Pemerintah Prancis. Asosiasi yang diakui oleh Pemerintah Prancis untuk komunitas Islam, yaitu *Conseil Francais du Culte Musulman* (CFCM). Organisasi ini dibentuk pada 2003 untuk memfasilitasi komunikasi antar-pemeluk Islam dengan Pemerintah Prancis.¹⁷

Dengan meningkatnya angka jumlah umat Islam di Prancis sangat wajar jika mereka mendapat perlakuan yang khusus. Mengingat pada dasarnya perkembangan umat Islam di Prancis sangat khas dengan kolonialisme yang pernah dibangun di beberapa negara oleh Prancis pada masa silam. Dan dengan itu hubungan formal komunitas Prancis dan pemerintah setidaknya memiliki jalur formal yang diakui oleh pemerintah Prancis sendiri. Pentingnya organisasi yang dalam hal ini kita sebut sebagai sebuah lembaga, mengingat lembaga mengandung pengertian yang lebih kompleks dari pada sekedar jaringan kebiasaan kehidupan kelompok. Dalam pengertian ini, lembaga lebih merupakan kristalisasi dari aksi dan kaedah-kaedah yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman hidup yang menunjuk pada pola perilaku yang mapan. Banyak pula kalangan menterjemahkan lembaga sebagai kumpulan cara berbuat yang berguna untuk mengatur stabilitas hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Keberadaan lembaga dalam hal ini turut membentuk citra bagi para anggota yang terkait dengan lembaga tersebut, lembaga organisasi Islam di atas menjadi garis hijau yang menjembatani urusan religiositas khususnya Islam dalam berurusan dengan gerak pemerintahan Prancis. Sehingga tercipta hubungan atau komunikasi yang harmonis antara komunitas muslim dan pemerintah Prancis. Mengingat komunitas imigran cenderung melahirkan prasangka negatif, yang nantinya menjalar pada sikap rasialis penduduk asli Prancis, akhirnya isu ini menjadi sangat populer di publik. Sehingga hal ini juga memberikan pengaruh pada ragam kebijakan pemerintah dan sikap politik dari berbagai komunitas secara umum.

Menurut Tsilla Hershco dalam artikelnya pada 14 Mei 2001 yang berjudul "*The French Presidential Elections of May 2007: Implications for French-Israeli Relations*", masalah berat dalam agenda publik Prancis mungkin sama-sama menjelaskan ketertarikan dari media dalam pemilu dan hasilnya. Dijantung perdebatan publik selama kampanye Presiden 2007, ada isu-isu penting sosial dan ekonomi domestik, termasuk defisit anggaran publik, pengangguran, kelangkaan penginapan murah, usia pensiun yang rendah, penurunan daya beli karyawan Prancis, imigrasi

¹⁷Sofyan Muhammad, dalam *Republika* Ahad, 18 Maret 2012. Hlm 3. Diakses 23-01 - 2013, pukul 23:32 wib

tidak terkontrol, buruknya sistem dan kebijakan pendidikan dan kesehatan. Di atas itu semua, ada indikasi hilangnya identitas nasional.¹⁸

Masih seperti pemimpin Perancis sebelumnya, Sarkozy kerap mengeluarkan kebijakan yang kadang menekan umat Islam yang ada di Perancis, khususnya yang berkaitan dengan aktifitas ibadah keseharian umat Islam. Salah satu kebijakan yang sejak dari dulu selalu muncul ke publik adalah penggunaan simbol keagamaan. Dengan beralih perancis sebagai negara yang demokrasi, sehingga penggunaan simbol-simbol keagamaan sangat dikekang. Hal inilah yang kemudian melahirkan reaksi keras umat Islam Perancis, bahkan juga dari kalangan umat agama lainnya misalnya Kristen dan Yahudi.

Jauh sebelum masa pemerintahan Sarkozy, kebijakan pemerintahan Perancis yang dikeluarkan oleh Presiden Perancis memang telah melakukan pengawasan yang ketat terhadap simbol-simbol keagamaan. Berkaitan dengan simbol-simbol Islam inilah yang memicu kegelisahan bagi masyarakat Muslim Perancis. Mengingat jilbab merupakan bagian penting bagi umat Islam khususnya kaum muslim perempuan. Jilbab atau dapat dikatakan juga *Hijab* adalah kewajiban bagi tiap muslim perempuan dimanapun berada. Jika penggunaan simbol-simbol keagamaan diperketat, tentunya akan menjalar pada menyempitnya ruang aktifitas atau kondisi religiusitas bagi para muslim perempuan Perancis.

Disebutkan oleh Yusuf Qardhawi, mengungkapkan keheranannya bahwa selama ini Perancis dikenal sebagai negara yang selalu mengusung kebebasan akan tetapi kenyataannya justru berbeda jauh dengan apa yang dibangga-banggakan selama ini oleh orang Perancis tentang kebebasan. Beliau menuliskan, mereka mengatakan bahwa negara tempat mereka tinggal adalah negara yang berperadaban, negara yang tercerahkan dan negara yang terbuka. Inilah yang dielu-elukan bangsa Perancis sejak revolusinya pada penghujung abad 18 yang menyerukan tiga prinsip, yaitu Freedom (kebebasan), Egaliter (persaman), dan Fraternity (persaudaraan), oleh karena itu kami sangat heran dengan sikap Perancis pada tahun-tahun terakhir ini yang menjadikan jilbab sebagai sesuatu yang terlarang dan terlalu dibesar-besarkan. Padahal, bagi wanita muslimah, mengenakan jilbab merupakan bukti ketaatannya terhadap perintah Tuhannya dan merupakan bukti konsistensinya terhadap kewajiban agama.¹⁹

¹⁸<http://www.biu.ac.id/SOC/besa/perspectives29.html>. Di akses 27 januari 2013, pukul 22:13 wib.

¹⁹Yusuf Qardhawi. *Larangan berjilbab (Studi Kasus di Perancis)*. Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani. (Jakarta; Gema Insani Press. 2004), hlm 54.

C. Peran Struktural Fungsional Umat Islam dalam Politik, Sosial dan Budaya di Perancis

1. Peran Umat Islam pada Masa Presiden Nicolas Sarkozy (2007-2012)

1) Peran Politik

Masa mendekati pemilu Presiden pada tahun 2012 (periode ini menjadi kedua kalinya bagi Sarkozy untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Perancis), Presiden Sarkozy yang menjabat waktu itu, seakan membuka tangan dengan komunitas muslim, dan meski demikian tentu saja orang-orang (khususnya kalangan Muslim) hanya memandang hal ini sebagai usaha komunikasi politik yang mulai dibangun oleh Sarkozy agar memperoleh simpati dari kalangan Muslim Perancis. Mengingat potensi suara yang dimiliki oleh komunitas Muslim Perancis sangat berpengaruh besar dalam meraih kemenangan pada pemilu yang akan datang.

Kedekatan Sarkozy dengan beberapa politikus berdarah Arab memang telah ada sebelumnya, Presiden Sarkozy sejak terpilih 6 Mei 2007 telah mengangkat tiga orang dengan latar belakang Muslim ke dalam kabinetnya. Pada tanggal 10 Juni 2007 ia menunjuk seorang keturunan Aljazair-Maroko yaitu Rachida Dati ke posisi Menteri Kehakiman. Dati sebelumnya adalah penasehat Sarkozy sebagai juru bicara ketika Sarkozy menjadi calon Presiden. Dati adalah putri dari seorang ibu dan ayah Maroko Aljazair. Terkait dengan pengangkatan pejabat Muslim dalam struktur kabinet, Azouz Begag pernah diangkat oleh Perdana Menteri Dominique de Villepin tahun 2005, sebelum pemerintahan Sarkozy.²⁰

Secara umum terdapat 3 menteri berdarah muslim yang masuk dalam susunan kabinet Sarkozy, adapun ketiga menteri ini berasal dari kalangan aktifis perempuan, antara lain adalah :

- a. Rachida Dati, Dati, adalah muslimah kelahiran Perancis dari orang tua yang berasal dari Afrika Utara. Ia ditunjuk sebagai menteri kehakiman.
- b. Rama Yade, Yade yang lahir di Senegal, dikenal sebagai politikus *Union for Popular Movement* (UPM) yang namanya sedang naik daun. Ia adalah puteri seorang diplomat yang bermigrasi ke Prancis 20 tahun yang lalu. Yade yang dibesarkan di daerah pinggiran kota Paris ini merupakan menteri termuda-usianya baru 30 tahun- dan ditunjuk

²⁰<http://www.euro-islam.info/country-profiles/france/>. Diakses pada 25-01 - 2013, pukul 12:34 wib.

sebagai menteri muda urusan luar negeri dan hak asasi manusia.

- c. Fadela Amara, Amara seorang muslim keturunan Aljazair ini dikenal sebagai tokoh kiri dan ditunjuk sebagai menteri urusan urbanisasi.

Mengomentari penunjukkan tiga menteri perempuan dari kalangan Muslim, Abdul Rahman Dahman-penasehat Sarkozy untuk urusan warga Muslim -menyatakan, "Penunjukan ini menandai sebuah revolusi yang nyata, bagaimana Perancis berhubungan dengan warganya yang berlatar belakang imigran."²¹ Dari ketiga orang di atas, dua diantaranya yaitu Rachida Dati dan Rama Yaade, mendapat banyak dukungan dari kalangan umat Islam. Adapun Fadela Amara, menjadi masalah bagi kalangan umat Islam mengingat aktifitas Amara sebelumnya sebagai aktifis yang sering mengkampanyekan untuk tidak menggunakan Jilbab ditempat umum, dan inilah yang juga melahirkan kekecewaan atas terangkatnya amara dalam kabinet Sarkozy.

Keraguan itu diungkapkan oleh Dahman sendiri. "Saya kenal baik Dati dan Yade, tapi saya betul-betul ragu dengan Amara yang kerap melontarkan pernyataan anti-Muslim. Dia tidak mewakili umat Islam di Perancis," katanya.²²

Akan tetapi jika melihat latar belakang kehidupan pribadi dari ketiga mantan menteri kabinet sarkozy diatas, justru membuat sebagian besar umat islam akan terkejut. Salah satu contoh misalnya Rachida Dati yang ditunjuk sebagai menteri kehakiman dalam kabinet Sarkozy, pada masa jabatannya Rachida Dati justru hamil di luar nikah, dan menjadi *single parent* untuk anak yang ia lahirkan. Melihat hal ini, tentunya menjadi aneh bagi kalangan umat Islam lainnya, khususnya yang ada di Perancis. Wanita keturunan Maroko ini, disebutkan dalam buku "*The Shaddow Of Rachida*", yang ditulis oleh saudaranya Jamal Dati. Dia menggambarkan Rachida Dati sebagai orang yang telah mempermalukan keluarganya yang selama ini sangat kuat memegang paham keagamaan. Sikap kontroversi Rachida Dati terjadi lagi saat dia tidak mau mengakui

²¹http://www.erasmuslim.com/berita/dunia-islam/tiga-muslimah-dalam-kabinet-pemerintahprancis-antara-harapan-dan-kenyataan.htm#.UcKqDdiM_XQ. Akses Juni 20 2013

²²http://www.erasmuslim.com/berita/dunia-islam/tiga-muslimah-dalam-kabinet-pemerintahprancis-antara-harapan-dan-kenyataan.htm#.UcKqDdiM_XQ. Akses Juni 20 2013

orang tua anaknya pada media, dan sekali lagi aksinya ini memicu keheboan di Media Perancis.²³

Jadi melihat bagaimana pengaruh politik dari ke tiga menteri yang notabene berasal dari kalangan Islam masih layak dipertanyakan. Selain karena identitas muslim yang melatar belakangi kehidupan mereka sebelumnya, halhal lain tidak ada yang patut dibanggakan, khususnya jika melihat kehidupan mereka. Poin penting dari pengangkatan mereka sebagai menteri kabinet Sarkozy, tidak lain hanyalah menjadi komoditi politik, untuk menarik simpati kalangan muslim lainnya yang sepaham dengan ketiga menteri ini. Nadia, seorang wanita muslim Prancis yang menggunakan jilbab, menyatakan bahwa dirinya tidak merasa diwakili oleh ketiga wanita dalam kabinet Sarkozy tersebut, bahkan merasa tidak nyaman atas status ke tiga menteri tersebut. Menurut Nadia bahwa, “Menjadi seorang Muslim merupakan pilihan atas keyakinannya yang sebenarnya, bahkan dengan mengikuti pola hidup Arab pun belumlah cukup,” menurutnya.²⁴

Rama Yade dengan nama asli Ramatoulaye Yade-Zimet adalah Menteri Perancis Untuk Pemuda & Olahraga dan merupakan salah satu tokoh politik yang paling populer di negeri ini. Hanya sembilan tahun setelah lulus dari Institut Ilmu Politik Paris, Yade telah menjadi fenomena perempuan muslim dari kalangan kulit hitam dan menjadi salah satu bintang paling terang di konstelasi politik Presiden Nicolas Sarkozy.²⁵

Fadel Amara yang diangkat dalam kabinet Sarkozy, merupakan aktifis perempuan yang dikenal selama ini bersemangat untuk mempersoalkan *ghetto*, atau kamp-kamp imigran, yang cenderung menempatkan wanita dalam pesakitan. Amara berhasil mengumpulkan kaum wanita Perancis dan mengajak mereka untuk mengancam aksi penindasan terhadap kaum wanita di kamp-kamp pengungsian para imigran. Khususnya pada tindak pemaksaan yang menciderai hak-hak kaum wanita di camp pengungsian para imigran. Amara menganjurkan untuk lebih berhati-hati terhadap pengkhotbah (Ulama Muslim) yang kerap kali menyisipkan paham-paham fundamental terhadap pemikiran pemuda muslim. Aksi yang

²³<http://www.dailymail.co.uk/news/article-1217183/Book-Rachida-Datis-brother-claimsbrought-shame-Muslim-family-single-mother.html>. akses juni 20 2013

²⁴ <http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=18119226>. Akses Juni 20 2013.

²⁵<http://aeea-la.blogspot.com/2009/09/frances-presidents-black-female-muslim.html>. akses Juni 24 2013

dilakukannya ini berangkat dari peristiwa pembakaran seorang wanita muslim yang menginginkan dirinya untuk hidup mandiri. Kekejaman yang dilakukan oleh para preman muslim ini dinilai akibat dari ajaran-ajaran fundamental yang di pahami oleh kaum muda di kamp imigran. Semangat untuk memperjuangkan hak-hak kaum wanita Perancis dari penindasan, merupakan aksi positif yang dilakukan oleh Amara. Akan tetapi apa yang dilakukannya, dilihat oleh sebagian muslim lainnya sebagai tindakan berlebihan. Lebih-lebih saat mengajak para muslim untuk melepaskan jilbab saat berada di tempat umum atau di ruang publik di Perancis.²⁶

Memang layak diakui bahwa, hadirnya 3 menteri dari kalangan muslim, menandakan keberhasilan warga muslim Perancis dalam mendapatkan peran penting yang setidaknya mampu menjadi harapan bagi warga muslim lainnya. Akan tetapi, harapan tersebut seakan berlebihan jika melihat bagaimana perilaku dan kinerja ketiga menteri tersebut. Harapan warga muslim Prancis untuk dapat mendapatkan pengakuan yang tidak hanya menekankan legalitas mereka akan tetapi juga pada pengakuan kebebasan beragama, menjalankan perintah agama hingga kebebasan dalam menggunakan simbol-simbol keagamaan. Kehadiran ketiganya dalam struktur kabinet Sarkozy, tidak berdampak apa-apa bagi perbaikan nasib Umat Islam di Perancis, selain fakta yang memperlihatkan bahwa, pada akhirnya ada warga muslim yang berhasil mencapai struktur pemerintahan di Perancis.

Sebenarnya keberadaan mereka dalam struktur pemerintahan Sarkozy merupakan posisi yang cukup strategis. Jika dikaitkan dengan perjuangan kalangan Muslim Perancis yang berusaha untuk mendapatkan hak hak mereka selaku warga yang beragama yang tidak berbeda dengan warga Perancis lainnya. Pengangkatan ketiga menteri tersebut memang tidak lepas dari motif politis Sarkozy untuk menarik simpati kaum minoritas, meski pada dasarnya ketiganya tidak mendapat perhatian penuh dari kalangan minoritas. Karena pengangkatan tiga orang menteri muslim dalam kabinetnya sangat bertentangan dengan kebijakan-kebijakan politiknya selama ini yang selalu mempersoalkan keberadaan kaum imigran di kota-kota di Perancis. Misalnya dalam sebuah wawancaranya, Sarkozy pernah menuduh Umat Islam sebagai penyebab meningkatnya angka pengangguran di Perancis. Sarkozy melihat pemukiman yang

²⁶<http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=18119226>. Akses 20 juni 2013

ditempati oleh sebagian besar para imigran Prancis tersebut (yang mayoritas Muslim) sebagai kawasan kumuh.

Dapat dilihat bahwa ke-tidak *respect-an* Sarkozy terhadap Islam pada paruh waktu merupakan lanjutan dari ketidakterimaan sebagian publik Prancis terhadap peningkatan jumlah imigran yang masuk ke Prancis. Apapun bentuk penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Islam hanya merupakan pengulangan semata, entah untuk menarik simpati warga asli Prancis atau karena didasari sangkaan berbau rasis pada pribadi Sarkozy sendiri. Prasangka atas ketidakjelasan Sarkozy memang bukan tanpa alasan, lebih-lebih jika melihat pada yang telah dijelaskan di atas. Disinilah terlihat jelas pengaruh yang diberikan oleh umat Islam Prancis khususnya dalam memberikan warna baru bagi kepemimpinan pemerintahan Prancis. Memang bisa dirasakan bahwa usaha politik yang dilakukan oleh umat Islam ini sebagian besar memberikan keuntungan besar bagi kepentingan Muslim Prancis, khususnya dalam mendapatkan legalitas mereka sebagai warga Prancis.

Terkait dengan kemenangan Hollande, banyak yang mengatakan jika Bill Clinton pernah dikenal sebagai presiden Amerika kulit hitam pertama, sementara Barack Obama sejak saat itu disebut Presiden „gay“ Amerika yang pertama. Hal yang sama dengan penuh percaya diri menurut seorang pengamat pemilu baru-baru ini Francois Hollande dari Sosialis dijuluki sebagai presiden Muslim pertama dari Prancis. Hal ini karena berita bahwa 93% dari Muslim Prancis memilih Hollande di babak kedua pemilihan presiden Prancis, yang menyebabkan kemenangan telak atas Nicolas Sarkozy dan calon dari nasionalis Marine Le Pen. Menurut situs internet Prancis, La Vie, penghitungan akhir untuk jajak pendapat menunjukkan bahwa Hollande dimenangkan hanya dengan 1,13 juta suara. Dengan 2 juta umat Islam yang memberikan suara, Partai Sosialis jelas berutang pada masyarakat muslim atas sumbangan suara yang memiliki angka yang cukup besar. Foto-foto yang ditemukan di *'Islamisasi de l'Observatoire'* website Prancis menunjukkan umat Muslim melambaikan bendera negara asal mereka dan gembira atas kekalahan Sarkozy.²⁷

Jalinan kerjasama yang terbangun dengan Partai Sosialis setidaknya dapat dijadikan jembatan bagi muslim Prancis untuk

²⁷<http://www.speroforum.com/a/JTMEAPVPLL49/72621> -Francois-Hollande-the-firstMuslim-President-of-France (sebagaimana di laporkan oleh Martin Barillas). Diakses pada 24-01 -2013, pukul 21:23 wib.

ikut membuktikan peran politik mereka khususnya bagi publik Perancis. Hal inilah yang mendorong perihai mulai terlihatnya peran politik Umat Islam di Perancis. Keberadaan umat Islam dalam jumlah besar tentunya diharap mampu memberikan pengaruh politik yang besar dan nantinya mampu memberikan kontribusi besar dalam kelanggengan umat Islam dalam menjalankan aktifitas keagamaannya, dan tentunya diluar dari kepentingan-kepentingan politik lainnya. Satu hal yang memberikan pengaruh besar bagi komunitas Muslim, yaitu dengan keberadaan organisasi muslim di Perancis menjadikan otoritas politik melihat Islam sebagai sebuah elemen (isu) penting dari perdebatan politik. Jika sebelumnya, keragaman etnis dan agama dalam populasi Muslim telah membuat kolaborasi menjadi sulit. Populasi muslim Perancis sebelumnya memang tidak memiliki badan pusat yang mampu mewakili kepentingan mereka di tingkat nasional. Hingga terbentuknya organisasi perwakilan barubar ini – Perancis Muslim Council (CFCM), yang memiliki dua unsure, dewan daerah dan dewan nasional. Meski demikian, masih terlalu dini untuk menilai seberapa efektif struktur baru ini akan berada dalam mewakili kepentingan Muslim.

2) Peran Sosial

Pada masa pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy, masyarakat Muslim Perancis mengalami beragam permasalahan yang umumnya berkaitan dengan hal-hal prinsip dalam ajaran Islam. Dari persoalan tersebut Komunitas Muslim merasa terpinggirkan dengan rangkaian kebijakan diskriminatif yang pernah dijalankan mantan Presiden Nicholas Sarkozy (semasa kepemimpinannya). Kebijakan itu antara lain melarang Muslimah mengenakan *burka*²⁸ di ruang publik. Sarkozy juga mewacanakan larangan pemotongan hewan sesuai tradisi Islam dan Yahudi.²⁹

Larangan atas penggunaan *burka* berkaitan besar dengan peran sosial masyarakat Muslim Perancis. Mengingat larangan tersebut tentunya berpengaruh besar bagi pergaulan sosial umat Islam khususnya saat berinteraksi dengan mereka yang non Muslim. Belum lagi jika memperhatikan interaksi sosial keluarga mereka, yang

²⁸Burka dalam hal ini mewakili segenap simbol-simbol keagamaan khususnya Jilbab. Meskimemiliki term yang berbeda akan tetapi substansi dri pelarangan tersebut bersifat general sehingga secara umum Burka dalam hal terkait dengan segala yang berhubungan dengan Tradisi Arab (Islam.Red) yang menutupi kepala.

²⁹<http://aceh.tribunnews.com/2012/09/28/Perancis-janji-integrasikan-muslim>.
Diakses pada 25-01 -2013, pukul 21:30 wib

mau tidak mau akan mengalami masalah, khususnya dalam menikmati fasilitas publik atau semacamnya. Pandangan miring tentang status *imigran* pada dasarnya sudah menjadi beban sosial mereka. Lebih lebih lagi jika ditambah dengan pelarangan penggunaan simbol-simbol yang justru merupakan hal yang fundamental bagi pribadi mereka selaku Muslim yang taat.

Pada pemerintahan sebelumnya (pada periode Jacques René Chirac) jilbab menjadi polemik bagi pemerintahan sehingga oleh pemerintahan pada masa itu, ada tiga tim yang terdiri dari pakar yang dibentuk oleh Presiden Chirac untuk membahas simbol-simbol keagamaan dan permasalahan permasalahan lainnya yang berkenaan dengan agama. Tim itu kemudian mengeluarkan rekomendasi bahwa penggunaan semua simbol keagamaan di larang, termasuk jilbab dalam agama Islam. Dengan alasan untuk mempertahankan wajah sekulerisme Perancis dan untuk mengukuhkan pemisahan antara agama dan negara. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah apa urusan negara dan berjilbab? bukankah jilbab murni urusan pribadi seseorang yang berkaitan dengan kebebasan dan kehendaknya? Apakah jilbab mempengaruhi kestabilan negara Perancis? Pertentangan antara pemerintahan dan umat Muslim terus berlangsung hingga kini.³⁰

Bagi banyak umat Islam di Perancis, urusan kerudung menjadi tanda yang menegaskan bahwa mereka pada dasarnya merupakan orang luar dalam masyarakat Perancis yang pada akhirnya mendorong mereka ke arah Islam yang lebih radikal dengan kehidupan yang tidak mendapatkan akomodasi dalam era abad dua puluh. Urusan kerudung bermula pada 1989 di daerah pinggiran Paris yang bernama Creil, ketika tiga anak perempuan Muslim diusir karena menolak untuk melepaskan kerudung mereka, dan akibatnya memberikan dampak yang signifikan pada seluruh Perancis bahkan hingga hari ini. Kepala sekolah mereka berpendapat bahwa memakai kerudung bertentangan dengan prinsip pemisahan gereja dan negara (prinsip sekuler), dan hal inilah yang menjadi alasan utama demonstrasi lokal menggelembung dan melahirkan perdebatan nasional tentang bagaimana Perancis dapat mengakomodasi Islam dan bagaimana umat Islam dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di sebuah negara sekuler.³¹

³⁰ Yusuf Qardhawi. *Larangan berjilbab (Studi Kasus di Perancis)*. Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani. (Jakarta; Gema Insani Press, 2004), hlm 59-60.

³¹Adam Lebor. *Pergulatan Muslim Di Barat Antara Identitas Dan Integrasi*. Terjemahan Yuliani Liputo. (Jakarta; Mizan Pustaka, 2009) hlm 210.

Semangat Sarkozy, untuk mengukuhkan sekularisasi di Perancis melahirkan tekanan bagi umat Islam. Meski demikian, tawaran-tawaran dari umat Islam untuk membiarkan mereka tetap menjalankan kewajiban agama mereka tetap berlangsung. Akan tetapi nilai utama dari polemik ini, adalah bahwa Sarkozy berusaha menghilangkan budaya Islam dalam struktur formal dalam masyarakat Perancis. Dalam struktur kabinet pemerintahan Sarkozy, Menteri Dalam Negeri Perancis, Claude Gueant mengeluarkan pernyataan kontroversial. Dalam pernyataannya, Ia mengatakan kelompok sayap kiri menganggap shalat tidak akan mengganggu siapapun. Faktanya masyarakat Perancis terganggu dengan hal itu. "Kami melarang mereka (Muslim) shalat di jalan. Itu adalah ekspresi peradaban," ucapnya. Menurut Gueant, apa yang dilakukan kelompok sayap kanan merupakan upaya membentuk peradaban yang diinginkan masyarakat Perancis. "Inilah yang kita inginkan," tegasnya. Sementara, lanjut Gueant, partai sosialis mendukung sebuah peradaban yang memperbudak perempuan, melanggar kebebasan pribadi dan politik, serta mempersilahkan tirani berkuasa. Sebelumnya, Gueant mengatakan negaranya dipenuhi pelayan dan tukang bangunan yang merupakan imigran dari luar Perancis. "Mereka tidak dibutuhkan," kata Gueant. Ia juga mendukung penuh kebijakan presiden Perancis, Nicholas Sarkozy, dalam memberlakukan kebijakan melarang burka dan aktivitas shalat di jalan umum.³²

Pemerintah Perancis telah memberlakukan undang-undang baru yang melarang umat Islam untuk menunaikan ibadah di jalan-jalan sebagaimana diberitakan gatestoneinstitute.org, tetapi pada hari pertama larangan tersebut, ratusan Muslim menantang hukum dengan mengambil alih jalan-jalan dan trotoar di Paris dan kota-kota Perancis lainnya untuk melaksanakan sholat. Larangan, yang mulai berlaku pada tanggal 16 September 2011 ini merupakan respon pemerintah terhadap kemarahan publik yang berkembang di Perancis atas fenomena umat Muslim yang sholat di jalan. Setiap Jum'at, ribuan umat Islam dari Paris ke Marseille dan hingga menutup jalan-jalan dan trotoar (dengan demikian, mereka menutup bisnis lokal dan warga non Muslim terperangkap di rumah mereka dan kantor) demi mengakomodasi meluapnya orang banyak untuk

³²<http://www.republika.co.id/berita/duniaislam/islammananegara/12/02/07/lz1672-mendagri-perancis-melarang-muslim-shalat-di-jalan-adalah-ekspresi-peradaban>.
Dikases pada 26-01 - 2013, pukul 22:13 wib

sholat Jum'at. Beberapa masjid juga mulai berkhotbah untuk menyerukan dan mengajak dengan panggilan "Allahu Akbar" (azan) melalui pengeras suara di jalan-jalan.

3) Peran Budaya

Meningkatnya protes pada masa kepemimpinan Sarkozy, merupakan salah satu akumulasi atas intimidasi yang formal yang dilakukan oleh pemerintahan Perancis yang kerap menganak tirikan komunitas Perancis, dan seperti yang dibahas sebelumnya tentu melahirkan pandangan negatif terhadap Muslim Perancis dan akan semakin mengakar dikalangan publik Perancis. Sarkozy sebagaimana yang dilansir dalam *suaramedia.com* Senin 13 Januari 2011, "Saya setuju dengan apa yang dikatakan Presiden Obama, termasuk pada jilbab dan kerudung," ujar Sarkozy. "Tapi saya hanya mengatakan dua hal. Di Perancis, setiap gadis muda, setiap gadis yang ingin memakai kerudung atau jilbab maka dia dapat melakukannya, dia bebas memilih untuk melakukannya." "Kami hanya menetapkan dua batas karena kita adalah negara sekuler, yaitu bahwa PNS yang bertugas harus benar-benar tidak menunjukkan tanda kepercayaan agama mereka, apapun itu, baik Yahudi, Ortodoks, Islam, Protestan, Katolik, sebutkan saja. Itu yang kami sebut dengan pemerintahan adil dan sekuler," tambahnya. "Dengan kata lain, ketika sedang bertugas di tempat kerja sebenarnya di mana mereka bekerja, harus tidak terlihat tanda apapun dari agama mereka. Kedua, kenyataan bahwa gadis muda dapat memilih untuk memakai jilbab tidaklah menjadi masalah karena sepanjang mereka benar-benar telah memilih untuk melakukannya, dan tidak dipaksakan kepada mereka, baik oleh keluarga mereka atau lingkungan mereka. "Dalam sebuah negara seperti Perancis, di mana setiap orang dapat hidup sesuai dengan kepercayaan mereka, kami menghargai individu, kami menghormati wanita, kami menghormati keluarga. Saya juga telah melakukan banyak hal saat menjadi sekretaris Menteri dalam negeri, untuk memastikan bahwa masyarakat Muslim di Perancis dapat melakukan praktek agama dan kepercayaan mereka seperti yang lain, agama atau kepercayaan lain di Perancis." Presiden Perancis tersebut menyimpulkan.

Diberitakan oleh *The Guardian post* edisi Senin 22 Juni 2009, Sarkozy dalam pidato kenegaraannya mengungkapkan; "Masalah burka bukan masalah agama, ini adalah masalah kebebasan dan martabat perempuan ini bukan simbol agama, tetapi merupakan tanda pengabdian dan kehinaan Saya ingin mengatakan dengan sungguh-sungguh, burka tidak diterima di France di negara kita, kita

tidak dapat menerima tahanan wanita di belakang layar, terputus dari semua kehidupan sosial, kehilangan identitas semua. Itu bukan ide kebebasan kami”. Demikian ungkapan Sarkozy dalam pidato kenegaraannya dalam usaha untuk mempertahankan prinsip sekuler Perancis, yang disambut gemuruh tepuk tangan oleh para anggota parlemen dan senator.

Dari ungkapan Sarkozy diatas, tentunya menjadikan umat Muslim tertekan utamanya bagi mereka yang bekerja bagi publik Perancis, atau mereka yang berkeinginan untuk bekerja pada ruang formal dalam ruang Perancis. Hal ini tentu menjadikan umat beragama dengan intensitas religiusitas yang tinggi sangat tertanggung untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga yang berhak atas pekerjaan baik swasta maupun dibawah naungan formal pemerintah. Pasca pemerintahan Sarkozy, pada pemilihan umum presiden 2012, bangsa Perancis memiliki Presiden baru yaitu Francois Hollande. Pada tanggal 6 Mei 2012, François Hollande merupakan tokoh Sosialis pertama yang terpilih presiden Perancis sejak François Mitterrand pada tahun 1995. Mr Hollande berkampanye di Perancis dengan model yang ramah, lembut, lebih inklusif, namun kemenangannya atas Nicolas Sarkozy juga dipandang sebagai tantangan terhadap kebijakan Jerman dengan dominasi penghematan ekonomi di zona euro, yang menderita dari resesi dan rekor pengangguran. Perlu diingat bahwa pada waktu Perancis sedang mengalami resesi ekonomi terkait dengan kasatuan negara Eropa terhadap nilai euro sebagai mata uang negara Eropa.

Disebutkan bahwa kemenangan Hollande dapat dikaitkan dengan terjalinnya hubungan baik antara unsur-unsur dari Partai Sosialis dan kelompok kiri lainnya dengan komunitas Muslim, bahkan persaudaraan dalam ruang Muslim ini cukup terkenal. Pada masa memanasnya isu tentang pembayaran Pajak di Perancis, pada tahun 2009, Jean-Marc Ayrault - yang mewakili Partai Sosialis di Majelis Nasional untuk kota Nantes – justru memberikan suara dalam mendukung subsidi pusat budaya dan masjid di kota dengan jumlah sebanyak 200.000 euro. Kota-kota lain yang di subsidi sebagai pusat kebudayaan Muslim dan masjid termasuk juga Clichy, Créteil, Poitiers, Nantes, Lille, Les Ulis, Roissy-en-Brie, Saint-Etienne di Metz, Rochefort, Angouleme, dan La Rochelle. Dalam beberapa kasus, tanah yang disumbangkan oleh pemerintah daerah untuk tujuan membangun pusat-pusat kebudayaan dan masjid.

Nampak dari apa yang dilansir dari situs speroforum.com, bahwa hubungan yang tercipta antara partai sosialis dengan kalangan

muslim tidak hanya pada bidang politik, akan tetapi juga pada ranah perkembangan kebudayaan muslim di Perancis dengan menjadikan masjid sebagai basis untuk perkembangan kebudayaan Islam di Perancis.

Dalam struktur pemerintahan, yang dibangun oleh Presiden Perancis Francois Hollande yang baru terpilih telah menunjuk tiga orang dari kalangan Muslim untuk ditempatkan pada 34 anggota kabinetnya menyusul kemenangannya, di mana 93 persen dukungan Muslim untuk calon sayap kiri Sosialis menempatkannya pada posisi diatas untuk mengalahkan Nicolas Sarkozy. Hollande menang dengan selisih 2,3 persen suara. Sekitar 1,7 juta Muslim memilih Hollande, yang memenangkan pemilu dengan hanya 1,1 juta suara. Setidaknya dua dari anggota kabinet adalah seorang Muslim yaitu, Najat Vallaud-Belkacem, lahir di Maroko, dan Yamina Benguigui, seorang asli Aljazair, yang kedua-duanya adalah perempuan.

Dengan kemenangan yang diraih partai Sosialis, kedepan diharapkan mampu menciptakan kondisi yang nyaman dan damai bagi umat Islam dan masyarakat perancis pada umumnya dalam menjalankan kewajibannya sereta memperoleh hak-haknya sebagai umat manusia dan beragama.

2. Organisasi Islam CFCM

Dalam beberapa tahun terakhir, Muslim Perancis telah mendapatkan badan perwakilan mereka sendiri. Sejak tahun 1960-an, banyak organisasi telah dibentuk di Perancis untuk mewakili Muslim Perancis, adapun beberapa organisasi (yang berpengaruh kuat) tersebut adalah Persatuan Organisasi Islam Perancis (UOIF - *Union des Organisations islamiques de France*), Federasi Nasional Muslim Perancis (FNMF - *Fédération nationale des Musulmans de France*) dan National League of Muslim Perancis (FNMF - *Ligue nationale des Musulmans de France*).

Adapun CFCM atau *The French Council of the Muslim Faith* yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan *Conseil Français du Culte Musulman*, merupakan salah satu dari sekian lembaga yang menaungi masyarakat Islam, yang memperoleh pengakuannya pada masa pemerintahan Sarkozy. CFCM, resmi dibentuk pada 28 Mei 2003 atas desakan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka membangun wadah yang mewakili semua kelompok. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri Jean-Pierre Chevènement pada tahun 2000. Pembentukannya mendapat legalitas dari Nicolas Sarkozy pada tahun 2003 dengan struktur yang terdiri atas sebuah dewan nasional dan struktur regional. Pembentukan badan ini didorong oleh negara dalam rangka untuk membawa Islam ke tempat yang lebih terbuka, sehingga *affording*

input lebih dari pemerintah Perancis. Meski demikian CFCM justru memperoleh kritik akibat adanya campur tangan negara dan bahkan banyak yang memandang bahwa struktur organisasi ini kurang memadai bagi Muslim Perancis. Seorang calon ketua yang didukung pemerintah Perancis, dialah Dalil Boubakeur (Pemimpin Masjid Paris), yang pada akhirnya terpilih sebagai presiden CFCM pada tahun 2003. Meskipun Boubakeur telah menerima kritik substansial karena tidak mewakili masyarakat luas dari Perancis dan karena terlalu pro untuk pemerintah, akan tetapi tidak menghalangi langkahnya untuk terpilih kembali pada 19 Juni 2005 sebagai ketua CFCM.

Berdirinya CFCM tidak lepas daripada kedekatan yang terjadi antara Dalil Boubakeur dengan pemerintahan Sarkozy. Kepala CFCM adalah Dalil Boubakeur, memperoleh dukungan dari Sarkozy dan Villepin untuk memenangkan kursi Dewan, satu hal yang penting dari terpilihnya Boubakeur adalah kedekatannya dengan pemerintah di Paris dengan anggapan bahwa Boubakeur, sebagai seorang Muslim mencoba untuk mengatur hubungan kerjasama antara Muslim Perancis, hubungan dengan pejabat pemerintah, dan mengakui (secara pribadi) keinginannya untuk merangkul budaya Perancis. Hal ini tentunya menguntungkan dirinya dalam memperoleh perhatian Villepin dan Sarkozy. Boubakeur mengatakan, "Saya tidak mendukung multikulturalisme, (di negara sekuler seperti Perancis), hanya ada satu budaya: Budaya Perancis." Ungkapan ini memperlihatkan bagaimana dia memberikan dukungan dalam pencapaian cita-cita sekuler, dan serta gambaran jelas hubungan persahabatan pribadinya dengan Chirac, Sarkozy dan yang membuatnya menjadi yang ideal sebagai ketua saat CFCM dibentuk.

Jika melihat kembali kembali tujuan dibentuknya organisasi ini, pada dasarnya untuk mencakup dua hal penting yang kelak menjadi warna utama dari CFCM. Tujuan dari konsultasi ini adalah untuk menciptakan sebuah representasi nasional apa yang dipandang-benar disebut Islam Perancis dan bukan Islam di Perancis. Pada akhir proses panjang ini, pada bulan Februari 2003, Komisi untuk organisasi konsultasi muslim di Perancis (COMOR) menyepakati pembentukan dewan Perancis untuk agama Islam (CFCM) dan dewan daerah untuk agama Islam (CRCM). CFCM yang seharusnya membawahi organisasi payung seperti FNMF (Federasi Nasional Muslim Perancis), UOIF (Organisasi Persatuan Islam Perancis), atau CRMF (Dewan Reprsentative Muslim Perancis), yang diciptakan pada tahun 1993 oleh Dalil Boubakeur, kepala masjid besar di Paris. Pada pemilu nasional dan regional pertama untuk CFCM (di mana sekitar 4000 pemilih yang mewakili masjid Perancis diizinkan untuk memilih) dimenangkan oleh UOIF (Persatuan Organisasi Islam di

Perancis) dan FNMF (nasional federasi muslim dari Perancis), keduanya konservatif dan dikenal memiliki reputasi radikal. Akan tetapi sebelum pemilihan dilakukan, telah diputuskan oleh mantan menteri dalam negeri Nicolas Sarkozy bahwa Dalil Boubakeur, rektor moderat Masjid Agung di Paris akan menjadi presiden CFCM. Oleh karena itu, sebaliknya Mohammed Bechari utusan FNMF dan Fouad Alaoui (UOIF) hanya memperoleh dua presidensi. Dan hal ini melahirkan banyak kritik yang menjadikan Dalil (Dalil Boubakeur) tidak mengikut sertakan dirinya dalam pemilihan ketua (CFCM) 2008, yang selanjutnya dimenangkan oleh Mohammad Moussaoui. Sebelum dilakukan pemilihan, seluruh organisasi Muslim telah sepakat akan pencalonan tunggal Moussaoui, yang dikenal memiliki reputasi sebagai konsensual.

Menurut pendapat Demas E. Boudreauxthesis bahwa, berdasarkan laporan media pemilihan umum dalam struktur CFCM, dan isu-isu insiden untuk pemilihan CFCM, penilaian saya tentang sistem pemilu adalah bahwa pada umumnya, lebih besar masyarakat Muslim di Perancis tidak cukup diwakili oleh CFCM. Jadi ini untuk dua alasan utama: Pertama, struktur politik CFCM adalah sedemikian rupa sehingga tidak termasuk banyak Muslim di Perancis. Kedua, CFCM dirasakan sebagai organisasi yang dikendalikan oleh orang luar yang tidak simpatik terhadap penciptaan 'French Islam' yang mencakup nilai-nilai Perancis, seperti sebagai sekularisme. Dalam skala nasional politik Perancis, peran CFCM yang menonjol, tatkala menjadi perantara dalam usaha pembebasan sandera atas penculikan yang terjadi atas dua wartawan Surat Kabar terkenal di Perancis yang terjadi di Bagdad, Irak. Serta menjadi salah satu perwakilan Islam dalam membahas persoalan Karikatur Nabi Muhammad yang diterbitkan oleh surat kabar Jyllands-Posten.

Dalam upaya pembebasan kedua wartawan itu, Menlu Perancis Michel Barnier mengunjungi Amman, Rabu, untuk yang kedua kali dalam 24 jam, dari Doha. Ia menyatakan Paris sangat berharap dua warganya yang disandera dapat dibebaskan sesuai dengan seruan-seruan banyak kalangan internasional, termasuk dari dunia Arab. Di Amman, Barnier hari Kamis bertemu dengan delegasi Majelis Ulama Perancis (CFCM), organisasi Muslim yang diakui negara itu dan tiba di Jordania sebelum melanjutkan perjalanan ke Baghdad guna mengupayakan pembebasan dua warga Perancis itu. Chesnot dan Malbrunot (nama dari kedua wartawan yang menjadi korban penculikan), yang menghilang sejak 20 Agustus, disandera oleh kelompok yang menamakan diri Laskar Islam Irak dan menuntut pemerintah Perancis untuk mencabut larangan menggunakan penutup kepala bagi siswi Muslimah di sekolah-sekolah pemerintah. Dalam rekaman video yang ditayangkan oleh stasiun TV Al Jazeera,

Chesnot (salah satu dari wartawan) memohon agar pemerintah Perancis mau memenuhi tuntutan penyandera. "Apabila tuntutan itu tidak dapat terpenuhi maka persoalannya menjadi hidup atau mati dengan ukuran waktu menit ke menit sampai menuju kematian kami," kata Chesnot.

Untuk kasus gambar Kartun Nabi Muhammad, pada tahun 2012 kembali mencuat. Kendati mendapat kecaman dari perdana Menteri Perancis akan tetapi tidak menyurutkan komunitas muslim dalam melakukan penolakan keras, hingga berujung pada kekacauan. "Perdana Menteri menegaskan ketidaksetujuannya dan menyerukan untuk semua orang agar bertanggung jawab," demikian pernyataan dari kantor Perdana Menteri Perancis. Kecaman yang sama juga mengalir dari Menteri Luar Negeri Perancis, Laurent Fabius. Semenjak kejadian itu, polisi setempat telah berjaga-jaga di depan kantor media mingguan tersebut. Pemerintah Perancis juga telah menutup kedutaan besar, konsulat, pusat kebudayaan dan sekolah sebagai langkah pencegahan.

Dalam sampul majalah tersebut nampak seorang Yahudi Ortodoks tengah mendorong pria bersorban yang didefinisikan sebagai Muhammad dari kursi roda. Sementara itu, di halaman dalam majalah nampak beberapa karikatur Nabi dalam keadaan tanpa busana. Dewan Muslim Perancis (CFCM) menilai rencana majalah Charlie Hebdo hanya menambah panas situasi di Perancis. "Mereka sepertinya senang memancing kemarahan umat Islam," kata Kepala CFCM, Mohammed Moussaoui, Rabu (19/9). Karena itu, Moussaoui, meminta umat Islam untuk menahan diri dengan provokasi tersebut. Sebab, apabila umat Islam termakan provokasi itu hanya akan memperparah situasi. Sebagai lembaga yang mendapat pengakuan pemerintah tentunya CFCM setidaknya mampu mewedahi segala hal yang berkaitan dengan dunia Islam di Perancis atau setidaknya menjadi perwakilan Islam di kawasan Eropa.

D. Penutup

Dari pemaparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa, peran umat Islam yang ada di Perancis yang dikenal sebagai negara bebas, namun disisi lain mengekang aktifitas keberagamaan. Panjangnya rentetan sejarah yang menggambarkan bagaimana pemerintah Perancis terus menerus menciptakan ruang sempit bagi masyarakat Islam Perancis, tidak menjadi penghalang bagi umat Islam Perancis dalam mempertahankan eksistensinya. Adapun peran penting yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Perancis dalam pemerintahan Sarkozy, dapat dilihat dalam ranah politik, umat Islam memegang peranan penting dalam pemilu presiden 2013, lewat usaha untuk menjegal Sarkozy sebagai presiden dan berhasil memenangkan Francois Hollande calon Presiden dari Partai Sosialis

sebagai Presiden. Yang dengan itu, diharapkan masyarakat Islam Prancis nantinya dapat memperoleh hak-haknya sebagai warga Negara dan dapat menjalankan kewajiban agamanya sebagai manusia beragama yang aman dan damai. Sedangkan pada ranah sosial, komunitas Muslim Prancis memiliki peran penting dalam membantu perekonomian Prancis mengingat kebanyakan dari umat Islam di Prancis adalah para imigran yang bekerja sebagai buruh di pabrik-pabrik pada dunia industri Prancis.

Kehadiran tiga menteri dalam kabinet Sarkozy yang berlatar belakang Muslim, tidak memberikan kontribusi yang berarti, selain fakta bahwa pencapaian kalangan muslim untuk masuk dalam struktur pemerintahan telah tercapai. Adapun ketiga menteri tersebut adalah : Rachida Dati selaku Menteri Kehakiman, Rama Yade selaku Menteri Muda Urusan Luar Negeri dan Hak Asasi Manusia dan Fadela Amara selaku Menteri Urusan Urbanisasi. Ketiga menteri tersebut tersangkut beragam persoalan baik menyangkut pribadi mereka maupun karena kinerja mereka yang tidak memuaskan. Singkatnya sasaran utama pergerakan politik umat Islam di Prancis adalah menuntut pengakuan atau persamaan hak sebagai warga negara, serta di sisi lain pengakuan tersebut setidaknya memberikan tingkat kepercayaan diri dalam berasimilasi dengan hukum yang berjalan di Prancis, dengan pengertian yang lebih tepat sasaran diatas *Laïcité*, hukum yang berjalan dalam diskursus agama dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdlal dkk. *Problematika Minoritas muslim di Kanada dan Prancis*. Dalam Jurnal Politik *Demokrasi Mati Suri*. Vol 4, No. 1, 2007. Pustaka Pelajar. Jakarta. 2007.
- Ali Kettani, M., *Minoritas Muslim Di Dunia Dewasa Kini*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Anderson, Stephen K. *Sosiologi Mikro Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Terjemahan. Jakarta Rajawali. 1993. Barth, Fredrik. *Les groupes ethniques et leurs frontières*, dalam *Theories de l'Éthnicité*. PUF. Paris. 1999.
- Budiman, Arief, *Kebebasan, Negara, Pembangunan Kumpulan Tulisan 1965 – 2005*, Cet Ke-1, Pustaka Alfabet Dan Freedom Institute, 2006 Cesari, Jocelyne. "Islam in France: The Shaping of a Religious Minority," dalam Yvonne Haddad-Yazbek (ed.) *Muslims in the West, from Sojourners to Citizens*, 2002, Oxford University Press. 2002.

- Firmonasari, Aprillia, *Wacanan Politik Nicolas Sarkozy : Analisis Psikostruktural Lacanian*. Dalam Jurnal Humaniora Vol 19, Edisi 3 Oktober 2007. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 2007.
- Hidayat, Agus "AHA". *Legium di Kancab Eropa*. Bentang Pustaka. Yogyakarta. 2008.
- Horton, B. Paul dan Chester L. Hunt. *Sosiologi*. Diterjemahkan oleh Drs. Aminuddin Ram, M. Ed dan Dra. Tita Sobari. Jakarta: Erlangga. 1999.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Alih Bahasa: Mufid, Cet I. Jakarta Rieneka Cipta. 1994.
- Labor, Adam. *Pergulatan muslim di Barat, antara Identitas dan integrasi*. Terjrn Yuliani Liputo. Mizan Pustaka. Jakarta. 2009.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: CV Rajawali. 2004
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*. Alih bahasa Alimandan ; Editor: Tri Wibowo Budi Santoso. Jakakarta. Kencana 2008.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Keempat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- <http://worldnews.about.com/od/france/p/Nicolas-Sarkozy.htm>
<http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11576712> <http://www.premier-ministre.gouv.fr> <http://www.biu.ac.il/SOC/besa/perspectives29.html>
<http://aceh.tribunnews.com/> <http://www.republika.co.id/>
<http://www.suaramedia.com/> <http://www.euro-islam.info/>
<http://topics.nytimes.com/> <http://www.speroforum.com/>
<http://pemerintah.atjehpost.com/> <http://www.israelnationalnews.com/>
<http://www.pacific.net.id> <http://hbis.wordpress.com/>
<http://armeey.blogspot.com/> <http://gobloggeris.blogspot.com/>
<http://vienmuhati.com/> <http://www.nytimes.com/>
<http://hbis.wordpress.com/> <http://www.euro-islam.info/>
<http://www.erasmuslim.com> <http://www.dailymail.co.uk/>
<http://www.jpnn.com/>